



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2021**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKAD Kabupaten Langkat tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja selama tahun 2021 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021. LAKIP BPKAD Tahun 2021 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang tugas yang diemban.

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Langkat Tahun 2021 terdiri atas 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 47 sub kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

-
- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
- 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Standar Satuan Harga dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - Penilaian Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

Meski beberapa program secara kuantitatif telah tercapai, namun secara kualitatif masih perlu peningkatan kualitas untuk mencapai hasil yang diharapkan dari Rencana Kerja yang ditetapkan. Hal ini terlihat pada perumusan program-program kerja pada tahun mendatang perlu lebih disempurnakan lagi agar indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada BPKAD Kabupaten Langkat dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Stabat,

2022

KEPALA BPKAD KABUPATEN LANGKAT



Drs. M. ISKANDARSYAH
NIP. 19660904 198603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
BAB I	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Sumber Daya SKPD	2
BAB II	5
A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	5
B. Indikator Kinerja Utama	9
C. Program dan Kegiatan	9
D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Perjanjian Kinerja	11
E. Anggaran	14
BAB III	15
A. Pengukuran Kinerja	15
B. Capaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran	17
D. Penutup	19

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas pokok dan fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat di pimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang membawahi beberapa subbagian/sub bidang yaitu :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - a. Sub. Bidang Administrasi Anggaran
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
3. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung
4. Bidang Verifikasi dan Pembukuan
 - a. Sub Bidang Verifikasi
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

5. Bidang Asset daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
- b. Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

B. Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPKAD Kabupaten Langkat didukung oleh sumber daya manusia aparatur per 30 Desember 2021 sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 35 (tiga puluh lima) orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian berdasarkan jumlah personil

No	Bidang Tugas	Eselon						Staf Pelaksana		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	-	-	1	-	-	2	6	4	7	6
3	Bidang Anggaran	-	-	1	-	2	-	3	6	6	6
4	Bidang Perbendaharaan	-	-	1	-	1	1	5	4	7	5
5	Bidang Verifikasi dan Pembukuan	-	-	1	-	-	2	1	3	2	5
6	Bidang Asset Daerah	-	-	1	-	1	1	1	-	3	1
7	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	20	15	20	15
	Jumlah	1	-	5	-	4	6	36	32	46	38

Rincian berdasarkan tingkat pendidikan

No	Bidang Tugas	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	3	1	4
4	Kasubbag/Kasubbid	-	-	-	-	9	1	10
5	Staf Pelaksana	-	-	7	2	23	1	33
6	Tenaga Kontrak	-	3	14	1	17	-	35
	Jumlah	-	3	21	3	54	3	84

Rincian berdasarkan golongan ruang

No	Bidang Tugas	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	3	4
4	Kasubbag/Kasubbid	-	-	10	-	10
5	Staf Pelaksana	-	5	25	3	33
6	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	35
	Jumlah	-	5	36	8	84

Rincian berdasarkan Diklat

No	Bidang Tugas	Diklat PIM			Jumlah
		II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	2
4	Kasubbag/Kasubbid	-	-	2	2
5	<i>Belum mengikuti Diklat PIM</i>	1	5	8	14
6	Staf Pelaksana	-	-	-	-
	Jumlah	1	6	13	20

b. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor.

Kantor BPKAD saat ini terletak pada Jalan Khairil Anwar Stabat.

2. Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 18 (delapan belas) unit, terdiri dari :

1. Toyota kijang tahun 1996 BK 907 P
2. Toyota kijang tahun 1996 BK 948 P
3. Toyota kijang tahun 1996 BK 957 P
4. Toyota kijang tahun 1996 BK 942 P
5. Toyota kijang tahun 1997 BK 903 P
6. Isuzu/Panther tahun 1997 BK 804 P
7. Daihatsu tahun 2001 BK 960 P
8. Toyota kijang tahun 2002 BK 171 P
9. Panther tahun 2002 BK 1649 GE
10. Toyota kijang tahun 2003 BK 4 P
11. Panther tahun 2003 BK 1752 GH

-
12. Jaguar tahun 2003 B 8659 BS
 13. Toyota kijang tahun 2006 BK 956 P
 14. Toyota Kijang innova G tahun 2008 BK 277 P
 15. Toyota Kijang innova E tahun 2008 BK 3 P
 16. Kijang innova tahun 2011 BK 1076 P
 17. Toyota Hi-lux tahun 2012 BK 8378 P
 18. Toyota All New Rush tahun 2018 BK 1208 P

- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 13 (tiga belas) unit, terdiri dari :

1. Honda legenda tahun 2002 BK 6943 P
2. Yamaha tahun 2004 BK 3002 P
3. Yamaha tahun 2007 BK 2223 P
4. Yamaha tahun 2007 BK 2242 P
5. Yamaha tahun 2007 BK 2325 P
6. Yamaha tahun 2008 BK 2359 P
7. Yamaha tahun 2008 BK 2323 P
8. Yamaha tahun 2008 BK 2331 P
9. Yamaha tahun 2010 BK 2574 P
10. Yamaha tahun 2010 BK 2573 P
11. Yamaha Vega 2 RD tahun 2010 BK 2575 P
12. Yamaha Vega 2 RD tahun 2012 BK 2637 P
13. Yamaha Vega 2 RD tahun 2012 BK 2638 P

3. Fasilitas

Fasilitas lainnya berupa, meja kerja pegawai, meja komputer, kursi kerja, kursi tamu, komputer, laptop, AC serta fasilitas lainnya guna mendukung kerja pada BPKAD Kab. Langkat

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Langkat 2019-2024 merupakan kondisi yang dicita-citakan dan ingin dicapai Kabupaten Langkat pada akhir periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih.

A. Visi

Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

"MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN"

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Langkat

Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju

Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius

Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparat pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur

Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan

Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

B. MISI

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan

Kabupaten Langkat sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
- 2) Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
- 4) Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
- 5) Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Langkat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024, maka BPKAD Kabupaten Langkat melaksanakan perwujudan dari Misi kelima yaitu **"Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih"**.

C. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat menetapkan tujuannya sebagai berikut :

No	MISI	TUJUAN
1.	Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi

b. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Misi : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
1.	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat.

Selanjutnya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, maka disusun strategi pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dengan prioritas agenda sebagai berikut :

NO	TUJUAN	STRATEGI
1	2	3
Misi : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
1.	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Penentuan kebijakan dapat mempertajam strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dalam mendukung strategi pelaksanaannya dengan melakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).

Kebijakan yang akan diterapkan pada Renstra sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3
Misi : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pelaporan dan akuntabilitas keuangan berbasis TIK
		Pengoptimalan pendataan dan pengelolaan aset daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yaitu :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja					
				2021	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Pengelolaan Keuangan Daerah									
1	Persentase perangkat daerah yang dokumen keuangannya selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang laporan asset/barang daerahnya diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase laporan perangkat daerah capaian kinerjanya terbit tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

C. PROGRAM dan KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat tahun 2021 direncanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
KEUANGAN	372.562.174.648,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.338.772.832,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.530.699.245,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.331.069.724,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	431.743.625,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	565.848.036,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	202.037.860,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.663.213.645,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	126.780.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	735.162.958,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	651.270.687,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.678.409.352,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.421.335,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.524.516,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.064.398,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.300.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.119.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	191.929.603,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.154.050.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	445.757.040,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.851.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.375.528,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.530.512,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.087.600,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.940.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	493.147.600,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.221.605.950,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	610.120.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.485.950,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	550.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	358.340.912.634,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.233.556.814,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	270.681.874,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	238.945.713,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	185.813.496,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	630.530.828,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	277.725.497,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	635.785.589,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.433.461.346,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	560.612.471,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.628.741.337,00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	97.070.370,00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	49.398.889,00
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	249.736.809,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	267.801.108,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	239.939.456,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	724.794.705,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	898.351.702,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	579.697.821,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	177.338.694,00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	141.315.187,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	351.580.262.781,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	338.422.209.100,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.552.975.746,00
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.605.077.935,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	882.489.182,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	882.489.182,00
Penyusunan Standar Harga	249.547.014,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	257.709.178,00
Penilaian Barang Milik Daerah	128.855.570,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	246.377.420,00

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)/PERJANJIAN KINERJA

Rencana kinerja atau perjanjian kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja Tahunan atau perjanjian kinerja memuat

sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja akan dilaksanakan pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Tahunan/perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yang akan dicapai melalui kegiatan tahunan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Persentase perangkat daerah yang dokumen keuangannya selesai tepat waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase perangkat daerah yang laporan asset/barang daerahnya diterbitkan tepat waktu	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		Persentase laporan perangkat daerah capaian kinerjanya terbit tepat waktu	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan d. Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
			Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2. Daerah a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
			Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Kerugian Daerah c. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak c. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Barang Milik daerah 1. Pengelolaan barang Milik daerah a. Penyusunan Standar Harga b. Pengamanan Barang Milik Daerah c. Penilaian Barang Milik Daerah d. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

E. ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat tahun 2021 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 372.562.174.648,- dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 67.470.095.700,- Belanja Operasi sebesar Rp. 20.214.524.255,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.767.319.724,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 13.447.204.531,- Belanja Modal sebesar Rp. 767.387.612,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 8.552.975.746,- Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 4.605.077.935,-. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 338.422.209.100,-

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Langkat. Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat mencakup penetapan proyeksi / target **indikator kinerja** atas program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam tahun 2021.

b. Pengumpulan Data Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja BPKAD Kabupaten Langkat tahun 2021 dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan. Pengumpulan data kinerja dilakukan pada saat penyusunan LAKIP dengan memanfaatkan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan BPKAD Kabupaten Langkat.

c. Metode/Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

d. Hasil Pengukuran Kinerja.

Pencapaian kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Langkat tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian tujuan dan pencapaian kinerja dari sasaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum BPKAD Kabupaten Langkat telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja program utama. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja program utama yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat tahun 2021 dengan realisasinya.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah.

a. Capaian sasaran

Indikator sasaran dari sasaran "Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah" adalah : "Opini BPK".

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Opini BPK	WTP		

Perbandingan realisasi indikator kinerja dari sasaran "Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah" antara tahun sebelumnya dengan tahun laporan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja				
		2020		2021		
		Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Opini BPK	WTP	100			

b. Realisasi Perjanjian Kinerja

Dalam mewujudkan capaian sasaran "Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah".

Dilakukan evaluasi dengan memperbandingkan antara target dan realisasi setiap kegiatan adalah sebagai berikut :

Kegiatan				Realisasi	%
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
Laporan keuangan Pemkab	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terlaksananya pelaporan akhir tahun asset dan persediaan	Tahun	100	100	100

Perjanjian kinerja untuk sasaran "Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah" terdiri dari 2 program antara lain : Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Serta 2 kegiatan yang capaian kinerjanya rata-rata 100%

c. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dari sasaran "Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah" adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	Opini BPK	WTP		

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat alokasi belanja dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

Selama periode Tahun Anggaran 2021, BPKAD Kabupaten Langkat menerima anggaran belanja sebesar Rp. 372.562.174.648,- yang terdiri dari belanja operasi

sebesar Rp. 20.214.524.255,- belanja modal sebesar Rp. 767.387.612,- belanja tidak terduga sebesar Rp. 8.552.975.746 dan belanja transfer sebesar Rp. 343.027.287.035,-.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 363.881.898.466,- atau 97,67% dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.033.822.662.334,00	2.132.849.298.149,93	99.180.077.215,93	104,87
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.470.095.700,00	60.697.411.688,93	(6.772.684.011,07)	89,96
4.1.2	Retribusi Daerah	72.600.000,00	23.700.000,00	(48.900.000,00)	32,64
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.950.000.000,00	6.017.927.136,00	(3.932.072.864,00)	60,48
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	57.447.495.700,00	54.655.784.552,93	(2.791.711.147,07)	95,14
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.852.093.766.634,00	1.958.046.527.861,00	105.952.761.227,00	105,72
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.774.332.178.356,00	1.891.142.736.316,00	116.810.557.960,00	106,58
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.761.588.278,00	66.903.791.545,00	(10.857.796.733,00)	86,04
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	114.258.800.000,00	114.105.358.600,00	(153.441.400,00)	99,87
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	114.258.800.000,00	114.105.358.600,00	(153.441.400,00)	99,87
	Jumlah	2.033.822.662.334,00	2.132.849.298.149,93	99.180.077.215,93	88,59
5	BELANJA	20.981.911.867,00	15.620.813.982,00	(5.361.097.885,00)	74,45
5.1	BELANJA OPERASI	20.214.524.255,00	14.895.694.342,00	(5.318.829.913,00)	73,69
5.1.1	Belanja Pegawai	6.767.319.724,00	5.865.688.427,00	(901.631.297,00)	86,68
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.447.204.531,00	9.030.005.915,00	(4.417.198.616,00)	67,15
5.2	BELANJA MODAL	767.387.612,00	725.119.640,00	42.267.972,00	94,49
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	767.387.612,00	725.119.640,00	(42.267.972,00)	94,49
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.552.975.746,00	5.914.458.400,00	2.638.517.346,00	69,15
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.552.975.746,00	5.914.458.400,00	(2.638.517.346,00)	69,15
5.4	BELANJA TRANSFER	343.027.287.035,00	342.346.626.084,00	(680.660.951,00)	99,80
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.605.077.935,00	4.605.077.935,00	-	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	338.422.209.100,00	337.741.548.149,00	(680.660.951,00)	99,80
	Jumlah	372.562.174.648,00	363.881.898.466,00	(6.041.758.836,00)	97,67
	Surplus/(Defisit)	1.661.260.487.686,00	1.768.967.399.683,93	107.706.911.997,93	106,48
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	197.035.973.844,00	197.035.973.844,49	0,49	100,00
6.1.1	Penggunaan SILPA	197.035.973.844,00	197.035.973.844,49	0,49	100,00
	Jumlah	197.035.973.844,00	197.035.973.844,49	0,49	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.217.131.050,00	5.217.131.050,00	-	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.217.131.050,00	5.217.131.050,00	-	100,00
	Jumlah	5.217.131.050,00	5.217.131.050,00	-	100,00
	Pembiayaan Neto	191.818.842.794,00	191.818.842.794,49	0,49	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.853.079.330.480,00	1.960.786.242.478,42	107.706.911.998,42	105,81

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja suatu Instansi Pemerintah di Kabupaten Langkat yang dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan dalam melakukan instropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

B. TINJAUAN KHUSUS

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Langkat pada Tahun 2021 melalui 11 (sebelas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan berada dalam skala pencapaian kinerja rata-rata 100%.

Tinjauan umum dan tinjauan khusus sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat menjadi refleksi obyektif atas kondisi kinerja BPKAD Kabupaten Langkat dan menjadi cermin sekaligus cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Kiranya LAKIP 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.